

Penerapan ketentuan pasal 37a undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang sunset policy dalam rangka peningkatan wajib pajak orang pribadi (studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan)

Risaria Syaputri, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=122667&lokasi=lokal>

Abstrak

Sunset Policy merupakan fasilitas dari Pemerintah berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau Badan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Sunset Policy diatur dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Mengenai Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dengan adanya ketentuan Sunset Policy diharapkan pajak tidak lagi merupakan momok bagi masyarakat, dan masyarakat diharapkan mau lebih terbuka dan transparan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Kebijakan Sunset Policy bertujuan untuk meningkatkan jumlah penerimaan Negara dari sektor pajak dan jumlah Wajib Pajak, baik itu Wajib Pajak Orang Pribadi maupun badan serta guna memperoleh basis data Wajib Pajak.

Oleh karena itu, penulis ingin membahas mengenai sejauh mana Peranan Sunset Policy dalam rangka peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, Khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan dan kaitannya dengan penegakan Hukum Pajak.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data yang bersifat analisis kualitatif guna menghasilkan data deskriptif. yang analisa datanya dibantu dengan data kualitatif yang berbentuk tabel dan grafik guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Meskipun di dalam pelaksanaan program Sunset Policy masih terdapat beberapa kelemahan, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa Program telah membuahkan hasil yang baik dalam rangka peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi. kedepannya hasil dari program ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan reformasi perpajakan dan penegakan hukum pajak Indonesia.

.....Sunset Policy is a government policy as an instrument to facilitate for Tax Payer to omit administrative penalty such as tax interest in the lack of the Personal Tax payer and Company Tax Payer in their Payment of Tax Income. The Sunset Policy Regulation is enacted in article 37A of Act Number 28 Year 2007 such as General Regulation of Taxation (UU KUP). The implication of Sunset Policy is expected that Taxation is longer will not hurry the Tax Payer, and they will be expected to become more open and transparent in reporting of their Taxation obligation. The goals of implementation of the Sunset Policy are to increase the sum of state income from Tax revenue, and also to increase the sum of Personal and Company Tax Payer, those expected to improve database.

Therefore this research is emphasizing in the Implication of Sunset Policy for increasing the sum of the Personal Tax Payer, particularly in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan and its relation to Tax Law enforcement.

This research conducted by juridical normatives method, which is using qualitative analysis in database collecting which will conclude descriptive data. which the data analyzing is using qualitative data such as table and chart to conclude the research question. Eventhough in this Sunset Policy there are still several

iminishment, but this program could impact the increasing sum of Personal Tax Payer. Furthermore this program is expected to the fundament for the government to create and enact Tax Policies such as Tax Reform and The Enforcement of Taxation in Indonesia.